

ANALISA PENGEMBANGAN WILAYAH MENUJU PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PEMBANGUNAN MERATA DI LUAR JAWA DARI SUDUT PANDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Andhi Rispata K.

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Jl, Kapten Suparman 39

Potrobangsari, Magelang, Jawa Tengah

Email: andhirispata63@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Salah satu contoh pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi dilihat dari pandangan teori pembangunan akan menempatkan unsur-unsur wilayah yang merupakan unsur sub nasional menjadi penting dan menarik dalam perencanaan pembangunan sehingga wilayah-wilayah memiliki peranan yang jelas dan sangat menentukan. Hal ini digambarkan dengan rencana pembangunan merata di luar Jawa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur. Analisis menggunakan teori Administrasi Pembangunan. Penelitian ini menunjukkan beberapa faktor kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan bentuk perencanaan sebagai wujud pembangunan nasional.

Kata Kunci : Administrasi Pembangunan; Pembangunan Nasional ; Pembangunan wilayah

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, dengan semakin berkembangnya taraf kehidupan manusia maka kebutuhan manusia pun semakin meningkat oleh karena itu diperlukan adanya sarana yang dapat mengatur ataupun mengendalikannya agar tercipta kesedapan hidup bersama. Dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks manusia tidak dapat hidup mandiri, mengasingkan diri dari lingkungan hidupnya, manusia perlu berkomunikasi, berhubungan dengan pihak lain. Hidup manusia akan saling tergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya saling ketergantungan tersebut maka diperlukan adanya kerjasama dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan

sehari-hari. Untuk bekerjasama, orang perlu memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan itu akan berlangsung terus menerus sepanjang jaman selama masih ada masyarakat. Kerjasama untuk menghadapi persoalan tersebut mangacu pada konsep pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Salah satu contoh pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi dilihat dari pandangan teori pembangunan akan menempatkan unsur-unsur wilayah yang merupakan unsur sub nasional menjadi penting dan menarik dalam perencanaan pembangunan sehingga wilayah-wilayah

memiliki peranan yang jelas dan sangat menentukan.

Pembangunan akan sangat ditentukan oleh adanya administrasi, keberadaan maupun perkembangannya. Sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat universal, administrasi negara hadir ditengah-tengah masyarakat seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Untuk itu pembangunan adalah suatu proses yang perlu dikaji sebagai bagian dari administrasi negara.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melakukan penelitian dengan mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan media serta studi literatur. Menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan analisis triangulasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Administrasi bagi pembangunan

Charles A Beard, menyatakan bahwa tidak ada subyek lain yang lebih penting dari administrasi. Dikatakan bahwa masa depan masyarakat beradab itu sangat tergantung dari kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan filosofi serta kemampuan administrasinya, maka dari itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah

difasilitasi oleh administrasi negara semata-mata ditujukan untuk memberikan kemudahan hidup serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian administrasi negara merupakan penyelenggaraan cita-cita masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, keberadaan administrasi negaranya dapat dilihat dalam dua hal sebagai berikut: (1) Dalam masyarakat modern setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan dalam administrasi negara. (2) Tersedianya banyak saluran control sosial terhadap penampilan administrasi negara.

3.2. Kebutuhan akan administrasi pembangunan

Secara teoritik, kebutuhan Administrasi Pembangunan dibedakan menurut model pembangunan yang digunakan. Sampai sekarang model-model pembangunan di Dunia Ketiga terus berubah. Perdebatan tentang pembangunan dalam dasawarsa 1950 sampai 1960-an lebih didominasi oleh nilai-nilai ekonomi.

- 1) Model Pembangunan Pertama (berpusat pada pertumbuhan). Pembangunan ini lebih bersifat “*center down*” dengan mengharapkan suatu pusat yang dominan yang akan memberikan tetesan ke bawah” pembangunan dalam dimensi sosio-ekonomi dan sosio-politik dapat ditimbulkan hanya oleh beberapa agen tertentu, sementara rakyat biasa adalah

pihak yang tidak mempunyai inisiatif dalam mengadakan perbaikan-perbaikan, dan pasti menerima ide atas dan akan menganggapnya paling cocok” (Klu, 1984: 29-30). Model pembangunan ini, memberi peranan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan, sistem administrasi yang diperlukan menurut Islam dan Henault (Seri Monograf, 1989:6) adalah sistem administrasi yang mampu menata organisasi dan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, sistem pengawasan keuangan dan kualitas personalia yang efektif dan efisien.

- 2) Model Pembangunan Kedua dikenal dengan *Basic Need* (Islam dan Henault, 1989:7). Model pembangunan ini merupakan reaksi dari ketidak berhasilan model pertumbuhan untuk memperbaiki tingkat hidup kaum miskin. Dalam prakteknya dikemukakan bahwa tidak selalu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan *income* perkapita tinggi dan sebaliknya. Fokus utama dari obyek pembangunan ini adalah penduduk miskin di dalam suatu negara. Jadi penanggulangan kemiskinan bukan lagi merupakan *trickle down* tetapi *direct attack*. Manifestasi dari model pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesempatan

kerja dan berusaha, pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan perumahan, kebijaksanaan tersebut dipandang sebagai strategi yang lebih baik bagi negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan dengan pendekatan model tersebut, pusat perhatian administrasi pembangunan adalah pada *delivery-service system* yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran pada organisasi lokal dan sektoral. Sistem administrasi ini diharapkan dapat memahami hakekat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara memuaskan. Bentuk paket program lebih bersifat padat karya, skala kecil, bertumpu pada sumber regional, berpusat pada desa, dan teknologi tepat guna. Administrasi pembangunan dengan model tersebut menghendaki adanya langkah-langkah debirokratisasi, pengembangan organisasi non birokrasi serta perilaku manajemen yang bersifat partisipatif dan mendorong inisiatif. Perlu adanya perhatian terhadap aspek-aspek desentralisasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah lokal, partisipasi lokal dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana.

- 3) Model Pembangunan Ketiga (berpusat pada manusia). Fokus dan nilai

pembangunan yang telah dialihkan dari industri ke pelayanan, kemudian diarahkan kemanusianya. Ini menggunakan indikator sosial dan berhubungan dengan sumberdaya yang ada. Pembangunan yang berpusat pada manusia tidak identik dengan pembangunan ekonomi plus modernisasi. Lebih dari keduanya, pembangunan dengan model ini adalah upaya meningkatkan kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya yang mencakup keadaan dan perbuatan yang sedemikian rupa dirancang sehingga mampu menjawab perubahan-perubahan yang ada. Model pembangunan ini membutuhkan apa yang disebut sebagai *transactive planning* dan administrator yang bersifat *facilitator*.

3.3. Pembangunan nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang bermaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3.4. MSDM

MSDM dapat didefinisikan sebagai pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi, baik secara individual maupun secara kolektif dan memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi.

3.5. Indikator pengukuran keberhasilan pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula 2 (dua) indikator lain yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks

Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap indikator-indikator tersebut:

1) Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan perkapita telah menjadi indikator makro-ekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2) Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dipihak lain, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3) Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di

wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4) Angka tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Financial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5) Indeks kualitas hidup

IKH atau Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat karena indikator makro-ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian

bayi, (3) angka melek huruf. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan perkapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6) Indeks Pembangunan Manusia

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini di dasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

4. DISKUSI

Ada beberapa makna dari kata pembangunan. Dalam perjalanannya konsep pembangunan berkembang menjadi beberapa kajian dengan tema-tema tertentu. Pada konteks Indonesia, terdapat salah satu pembangunan yang dapat dikaji.

Pembangunan nasional negara Indonesia yang tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan diseluruh wilayahnya, sampai saat ini masih banyak timbul masalah. Salah satu yang masih dijumpai adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan antar wilayah administrasi. Wilayah perbatasan selama ini identik dengan wilayah perdesaan, wilayah pertanian, wilayah miskin, dll. Untuk pengembangannya diperlukan kebijaksanaan yang sesuai secara lokalita, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan hambatan pengembangan di wilayah-wilayah tersebut. Salah satu topik mengenai pembangunan wilayah adalah soal “Pembangunan Merata di Luar Jawa Bakal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi”.

Sebagaimana diketahui bahwa kemampuan dan potensi setiap wilayah berbeda satu sama lain, demikian pula masalah pokok yang dihadapinya juga tidaklah sama. Sehingga pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan harus disinkronkan dengan usaha-usaha pembangunan regional. Untuk dapat melihat pembangunan tersebut secara lebih mendalam, maka ada berbagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah Indonesia.

Pembangunan ini merupakan pembangunan nasional dengan menggunakan model pembangunan kedua. Karena pada

dasarnya, fokus utama dari obyek pembangunan ini adalah penduduk miskin. Manifestasi dari model pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan perumahan, kebijaksanaan tersebut dipandang sebagai strategi yang lebih baik. Hal tersebut ditarik dari keterangan bahwa di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi juga tidak lepas dari ketimpangan pembangunan. Agar rencana pengembangan ini berjalan dengan baik, maka yang menjadi kebutuhan Administrasi Pembangunan sesuai model kedua ini adalah partisipasi masyarakat pada organisasi lokal dan sektoral serta dukungan dari adanya teknologi tepat guna. Fokus ini merujuk pada langkah-langkah debirokratisasi, pengembangan organisasi non birokrasi serta perilaku manajemen yang bersifat partisipatif dan mendorong inisiatif. Sehingga, partisipasilah yang menjadi kapasitas utama pelaksanaan rencana yang akan mempengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan

Jika hal ini dilihat dari Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, target-target yang dibuat oleh Bappenas telah mengacu pada indikator tersebut didalam

melakukan perencanaannya sesuai ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat acara Indonesia Development Forum 2018, antara lain:

1) Pendapatan perkapita

“Petama, target kita jangka pendek adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa” Selasa (10/7/2018). Ia berharap, pusat pertumbuhan di luar Jawa tak hanya temporer yang kemudian hilang. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang tidak bisa dihilangkan dan dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2) Struktur ekonomi

“Tetapi pusat pertumbuhan berbasis pengelolaan, tidak hanya industri manufaktur seperti tekstil, otomotif, tapi urutan dari sumber daya alam juga bisa”, untuk mewujudkannya konektivitas infrastruktur harus dibangun. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.

3) Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi

digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan yang dibahas sebagai munculnya kota metropolitan di luar Jawa. Keberadaan kota metropolitan akan menjadi sumber awal dari pertumbuhan itu sendiri. “Dengan pembangunan merata di luar Jawa, diharapkan kesejahteraan masyarakat lebih merata dan ketimpangan sedikit demi sedikit tergerus, kalau kemudian ini bisa terjadi, ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terbantu”.

4) Angka tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Financial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Ini dijelaskan melalui pernyataan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen dan menurutnya pertumbuhan ekonomi 6 persen atau lebih bukan mustahil tercapai. Syaratnya motor pertumbuhan tidak hanya Jawa dan Sumatera, tetapi seluruh Indonesia yang terhubung dengan baik, punya infrastruktur dasar yang memadai, dan pajak relatif memadai.

5) Indeks kualitas hidup

Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan perkapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

Hal tersebut dijelaskan dengan “Kita harapkan orang mau bekerja di kota manapun di Indonesia, karena setiap kota manapun bisa menjamin kehidupan yang layak dan pekerjaan yang memenuhi harapan”.

Namun disisi lain, Bappenas perlu memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia untuk keperluan pengembangan sehingga akan mempermudah mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan dengan di dasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang dimasa mendatang. Karena pada dasarnya, sumber daya manusialah yang berperan memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi melalui administrasi.

5. PENUTUP

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Salah satu contoh pembangunan adalah pembangunan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak diimbangi

dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan. Untuk itu dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan pertumbuhan sebanyak mungkin di wilayah pulau Jawa. Hal ini merupakan target jangka pendek untuk mempersempit kesenjangan antar-wilayah di Indonesia dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Ini merupakan model Pembangunan Kedua yang membutuhkan adanya partisipasi dan dukungan teknologi tepat guna. Jika dilihat dari Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan, target-target yang dibuat oleh Bappenas telah mengacu pada indikator tersebut didalam melakukan perencanaannya sesuai ujar Menteri Perencann Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat acara Indonesia Development Forum 2018, antara lain: (1) Pendapatan perkapita; (2) Struktur ekonomi; (3) Urbanisasi; (4) Angka tabungan; (5) Indeks kualitas hidup. Namun disisi lain, Bappenas perlu memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia untuk keperluan pengembangan melalui administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] An-naf. 2011. Tinjauan Analitis Terhadap Model Pembangunan Indonesia. Kybernan.
- [2] Budianta, Aziz. 2010. Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Wilayah Di Indonesia. Palu
- [3] Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. 2010. Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional. Jakarta.
- [4] Huda Nur, Khairul Muluk, dan Wima Yudo Prasetyo. 2011. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). Universitas Brawijaya. Malang

- [5] Huda, Samsul. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kompeten Sebagai Basis Pembangunan Daerah. Jambi.
- [6] Suardita, I Ketut. 2016. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Udanaya.
- [7] Winarni. 1995. Dinamika Penerapan Model-Model Pembangunan Dan Sistem Administrasi Pendukungnya. Cakrawala Pendidikan

(Berita online)

<http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/10/211546426/pembangunan-merata-di-luar-jawa-bakal-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi?espv=1>(diakses pada Selasa, 21 Oktober 2018)

<http://www.kompasiana.com/aishkhuw/550f03c1a33311aa2dba82f7/pengembangan-wilayah-menuju-pengembangan-nasional-dalam-ekonomi-dan-hukum> (diakses pada Selasa, 21 Oktober 2018)